

## ABSTRAK

Di dalam penulisan skripsi ini penulis akan menjabarkan seluruh aspek tindak pidana yang terkait dengan hukum perjanjian yang diangkat dari Undang-undang Jaminan Fidusia, yakni mulai dari karakteristik tindak pidana dalam perjanjian pembiayaan fidusia berdasarkan ketentuan atau kategori perbuatan pidana dalam perjanjian fidusia hingga jenis-jenis tindak pidana yang dapat terjadi dalam hukum perjanjian pembiayaan ini hingga bentuk pertanggungjawabannya.

Tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu antara lain, pemalsuan surat sehingga melahirkan perjanjian fidusia, dan penipuan.

Tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu adanya peralihan hak atas benda tanpa persetujuan pihak kreditur yaitu dengan cara menjual, menggadaikan serta menyewakan benda yang menjadi jaminan fidusia tanpa persetujuan Kreditur sebagai pihak penerima fidusia.

Tindak pidana yang terjadi di dalam eksekusi Obyek jaminan Fidusia apabila dalam eksekusi tersebut terjadi perampasan dan pengancaman yang diatur di dalam Pasal 368 KUH Pidana.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perjanjian Pembiayaan Fidusia berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur setiap tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mana pertanggungjawaban pidananya dapat menggunakan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai pemenuhan asas *lex specialis derogate legi generali*.

**Kata Kunci :** *Hukum Pidana, Perjanjian, Fidusia*

## ABSTRACT

In the writing of this essay the author will describe all aspects of criminal acts related to the law of the treaties appointed from the Fiduciary Guarantee Act, ie ranging from the characteristics of criminal acts in fiduciary financing agreement under the terms or categories of criminal acts in the fiduciary agreement to the types of acts penalties which may occur in the law of this financing agreement until the form of liability.

The criminal act as regulated in Article 35 of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security is among other things, falsification of letters resulting in fiduciary agreements, and fraud. Criminal acts set forth in Article 36 of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guaranty that there is a transfer of rights to objects without the approval of the creditor that is by selling, mortgaging and leasing objects that become fiduciary guarantee without the approval of the creditor as the fiduciary party.

Criminal acts committed in the execution of Fiduciary Guarantee Object if in the execution there is seizure and threats set forth in Article 368 of the Criminal Code.

Forms of Criminal Accountability in Fiduciary Financing Agreements based on the fulfillment of elements of any offenses set forth in Article 35 and Article 36 of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security in which criminal liability can use Law Number 42 Year 1999 Challenge Fiduciary Guarantee as the fulfillment of *lex specialis derogate legi generali* principle.

**Keywords:** *Criminal Law, Agreement, Fiduciary*